

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyuluhan pertanian secara umum merupakan upaya dari pemerintah untuk mengubah sikap dan perilaku petani dalam mengelola usahanya agar lebih efektif dan efisien sehingga tingkat kehidupannya meningkat. Sebagai tugas pemerintah efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat petani dalam memperoleh pelayanan dari penyuluhnya. Menurut Mowen, (1995) dalam Kartikaningdyah, (2012) Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan .

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja penyuluhan dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan penyuluhan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka pelayanan pemerintah termasuk penyuluhan pertanian umumnya dan penyuluhan peternakan khususnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah

daerah dapat berinovasi untuk melakukan pengelolaan penyuluhan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran.

Bila otonomi daerah berarti memperpendek jarak untuk pengawasan ( Span Of Control ) maka akan lebih mudah memahami masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya akan memudahkan untuk berinovasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Di Provinsi Sumatra Barat sub-sektor peternakan pada kabupaten dan kota hanya menjadi bagian pengelolaan sektor pertanian secara umum. Oleh sebab itu dalam susunan Organisasi dan Tata Kerja ( OTK ) peternakan di urus oleh jabatan biokrasi level Eselon 3 (Kabag). Namun pada Kabupaten pesisir Selatan sub-sektor peternakan di kelola oleh suatu dinas atau Level Eselon 2 yang di pimpin oleh Kepala Dinas.

Tingginya level biokrasi yang mengelola tentu di harapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini tentu tidak terkecuali di sub-sektor peternakan. Pelayanan yang lebih baik akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi untuk masyarakat. Bagaimana hal ini di kabupaten Pesisir Selatan khususnya tentang penyuluhan peternakan ? Pertanyaan ini ingin di jawab melalui penelitian ilmiah yang hasil nya akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyuluhan Peternakan di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan peternakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyuluh peternakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan peternakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada Era Otonomi Daerah.
2. Untuk mengetahui Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Penyuluhan Peternakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada Era Otonomi Daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat baermanfaat sebagai informasi ilmiah yang di gunakan oleh pihak terkait :

1. Referensi bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyuluhan Peternakan di era Otonomi Daerah.
2. Penyuluh dapat mengetahui informasi mengenai kepuasan masyarakat di era otonomi daerah .
3. Bagi pemerintah seperti dinas peternakan manfaat yang dapat di peroleh adalah mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan peternakan

### 1.5 Batasan penelitian atau Ruang Lingkup

Penelitian indeks kepuasan masyarakat di batasi hanya pada peternak sapi potong. Hal ini disebabkan oleh sasaran utama penyuluh peternakan adalah peternak. Yang di maksud dengan masyarakat pada penelitian ini adalah kumpulan dari beberapa peternak sapi potong yang berada pada wilayah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

